

**KONFLIK KEPENTINGAN DIBALIK KONSERVASI
STUDI DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS)
PROVINSI JAMBI**

Kausar*

Abstract

The existence of conservation areas in Indonesia turned out to have caused lots of problems and conflict with society, especially local communities around the conservation area. Similarly, conservation areas of TNKS can not be separated from the conflicts of interest from various parties around the area. Therefore, this study tried to involve how conflicts of interest that occur within the conservation area of TNKS. In this research the method was descriptive while the approach used was qualitative research. Research location was in Kerinci regency, Jambi Province, where more than 50% of this area is the territory of TNKS region. The collecting of key informans used purposive sampling where respondents were drawn from those who know about the TNKS conflict and involved in the conflict. Based on research, there are many parties or stakeholders in the conflict, namely the conflict between the interests of global/international and inside Indonesia, conflicts of central and local governments in the management of conservation areas, and conflicts between the countries and people. So actually behind the conservation there is hidden conflict of interest from various parties. Alternative solutions which need to be applied is to accommodate the interests of each party, as well as to take steps to preserve the integrity of the conservation area.

Keywords: conflict of interests, conservation area

* **Kausar** adalah Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) Faperta Universitas Riau, Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah umum diketahui bahwa isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu global selain demokrasi dan hak asasi manusia. Sejak akhir tahun 1970-an, lingkungan hidup menjadi sebuah agenda politik, ekonomi, dan bisnis global. Dalam kaitan dengan itu, kita perlu mencermati fenomena global yang berkembang akhir-akhir ini dengan isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan globalisasi ekonomi. Disatu pihak, masuknya pertimbangan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan dan interaksi ekonomi dan bisnis global membawa dampak positif bagi kepedulian yang semakin besar terhadap lingkungan hidup, baik domestik, regional maupun internasional. Dalam arti tertentu, kekuatan dan mekanisme pasar global dapat menjadi faktor pendorong utama bagi upaya setiap negara bangsa untuk melindungi lingkungannya dan lingkungan global (Keraf, 2002)

Dalam rangka untuk menjaga dan mengelola sumberdaya tersebut maka perlu dilakukan antisipasi dan langkah-langkah untuk menjaga dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sebaik mungkin bagi kehidupan. Konservasi dan kelestarian alam telah menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis ekosistem kelestarian tersebut, pada tahun 2000 telah ditetapkan kawasan konservasi seluas 56.482.407,20 ha yang tersebar di daratan maupun kawasan perairan. Salah satu jenis kawasan konservasi yang dikelola adalah Kawasan Taman Nasional. Luas total Kawasan Taman Nasional di Indonesia adalah 14.753.176,18 ha yang terbagi ke dalam 39 unit dengan lokasi 33 unit berada di daratan serta 6 unit berada di wilayah perairan. Penetapan kawasan taman nasional dipandang sangat strategis terutama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan tanpa mengesampingkan aspek kelestarian sumberdaya alam hayatinya. Salah satu Taman Nasional yang menjadi perhatian dunia adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (Nasution, 2003).

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah merupakan suatu kawasan yang memegang peranan yang amat penting bagi keseimbangan ekologi di Indonesia, khususnya di Sumatera, dimana TNKS ini mencakup beberapa propinsi di Sumatera,

yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu. TNKS merupakan Taman Nasional terbesar di Sumatera dan nomor dua terbesar di Indonesia, yang memiliki kekhasan dalam kekayaan keanekaragaman flora dan fauna. Dimana berfungsi sebagai pengendali erosi, banjir dan merupakan sumber air dan dinyatakan sebagai paru-paru dunia.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 luas TNKS adalah 1.484.500 hektar. Dimana untuk Provinsi Jambi luasnya meliputi 45% dari luas keseluruhan, yaitu 635.185 hektar. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.46/KPTS/II/1987 tanggal 12 Februari 1987 (tata guna Hutan Kesepakatan) untuk Provinsi Jambi mencakup 3 kabupaten, yaitu: Kabupaten Kerinci 271.795 hektar (43%), Kabupaten Sarolangun Bangko 268.980 hektar (42%), dan Kabupaten Bungo Tebo seluas 94.410 hektar (15%).

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas terlihat bahwa bagian yang terluas dari kawasan TNKS di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Kerinci. Kemudian apabila dibandingkan dengan luas Kabupaten Kerinci sendiri, yaitu seluas 4200 Km², hampir 60% atau 245.960 hektar adalah kawasan TNKS. Ini berarti bahwa 283.922 jiwa penduduk Kabupaten Kerinci hanya memiliki kesempatan memanfaatkan tanah seluas 164.590 hektar untuk berbagai keperluan, padahal hampir 84% masyarakat Kabupaten Kerinci adalah bekerja sebagai petani, dimana memiliki ketergantungan yang tinggi pada tanah pertanian (Bakosurtanal, 1995).

TNKS dinyatakan secara resmi sebagai taman nasional dengan SK Menteri Kehutanan No.1049/Kpts-II/1992 pada tanggal 12 November 1992. Kemudian SK Menteri Kehutanan No.192/Kpts-II/1996 menetapkan luas TNKS lebih kurang 1.368.000 ha. Setelah diadakan penataan batas, TNKS secara resmi ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan SK No.901/Kpts-II/1999 pada bulan Oktober 1999 dengan luas 1.375.349 ha. Karena itu, TNKS merupakan taman nasional pertama di Indonesia yang telah menyelesaikan semua prosedur hukum sehingga mendapat penetapan secara resmi (BTNKS, 2002).

Tabel 1. Luas Total Kawasan TNKS

No.	Provinsi	Luas Kawasan (ha)	Persentase (%)	Jumlah Kabupaten
1.	Jambi	422.192	30,86	3
2.	Sumatera Barat	353.780	25,86	3
3.	Bengkulu	310.910	22,73	2
4.	Sumatera Selatan	281.120	20,55	1
	Jumlah	1.368.002	100,00	9

Sumber : Balai TNKS (2007).

1.2. Permasalahan

Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai salah satu kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Indonesia, telah membawa implikasi munculnya konflik sosial di masyarakat. Masyarakat sekitar tidak boleh lagi dengan bebas untuk melakukan akses dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada seperti dahulu. Padahal masyarakat telah mendiami kawasan TNKS dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak jelasnya tapal batas taman nasional dengan desa-desa yang ada di sekitar kawasan TNKS. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri adalah masuknya berbagai aspek kepentingan sosial ekonomi dengan membawa ideologi kapitalistik pada masyarakat lokal.

Fenomena di atas telah membawa dampak pada munculnya konflik sosial antara kepentingan pemerintah untuk melakukan konservasi dan pelestarian alam dengan kepentingan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan kepastian tapal batas taman nasional. Selain konflik antara rakyat dan pemerintah dalam pengelolaan TNKS, saat ini seiring dengan semangat otonomi daerah telah pula memunculkan keinginan daerah agar diberi kewenangan dalam mengelola sumberdaya hutan di kawasan TNKS. Karena selama ini yang mengelola TNKS adalah BTNKS yang dianggap oleh pemerintah daerah hanya mengikuti keinginan pemerintah pusat. Sehingga muncullah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Disamping konflik diatas, ada lagi fenomena intervensi dari dunia internasional (Bank Dunia dan IMF), lembaga internasional/NGO tersebut dalam konservasi di Indonesia ternyata mempunyai pengaruh yang besar melakukan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk pelestarian sumber daya alam. Dalam pemberian pinjaman

kepada pemerintah, lembaga internasional tersebut selalu memasukan faktor lingkungan dalam pemberian hutang, dimana Indonesia dipaksakan mengikuti keinginan lembaga donor untuk menjaga lingkungan alamnya. Untuk mengawasi program pelaksanaan konservasi di Indonesia lembaga internasional tersebut berkerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non Government Organization (NGO) yang ada di Indonesia. NGO tersebut merupakan perpanjangan tangan lembaga internasional melakukan tekanan pada negara dalam konservasi sumberdaya alam.

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui latar belakang konflik dibalik konservasi, pihak-pihak mana saja yang terlibat konflik, dinamika konflik yang terjadi, dan alternatif resolusi untuk mengatasi konflik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konflik sosial yang terkait dengan konservasi lingkungan bisa terjadi antara masyarakat lokal dengan pihak pemerintah, atau antara masyarakat dengan pengusaha ataupun antara masyarakat sendiri. Disamping konflik pada level nasional, ada lagi konflik kepentingan yang lahir akibat dari masukannya intervensi dari lembaga-lembaga internasional dalam memaksakan konservasi pada suatu negara. Konflik sosial dalam konteks ini dapat dikonsepsikan sebagai hubungan sosial yang tidak harmonis sebagai konsekwensi dari perbedaan nilai, kepentingan dan tindakan yang terdapat dalam masyarakat terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan.

Pengelola lingkungan dan sumberdaya alam membutuhkan kemampuan untuk menghadapi konflik. Langkah pertama adalah kemampuan untuk mengenali beberapa sebab yang menimbulkan konflik. Menurut Dorsey (1986), dalam Bruce Mitchell dkk (2000), ada empat penyebab dasar konflik, yaitu perbedaan pengetahuan dan pemahaman, perbedaan nilai, perbedaan alokasi keuntungan dan kerugian, dan perbedaan karena latar belakang personal dan sejarah kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Dalam usaha untuk memudahkan memahami konflik sosial tersebut, perlu untuk melakukan pemetaan konflik sosial terkait dengan lingkungan. Menurut Hannigan (1995) sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu faktor-faktor determinan mempengaruhi lingkungan dan gerakan-gerakan sosial yang merespon lingkungan

tersebut dalam bentuk aksi mempengaruhi pelbagai pihak untuk merubah keputusan. Faktor-faktor yang determinan mempengaruhi lingkungan dapat diterangkan melalui dua macam eksplanasi, yaitu ekplanasi ekologis dan eksplanasi ekonomi politik. Meskipun kedua macam eksplanasi tersebut sebenarnya sama-sama mengkaitkan persoalan lingkungan dengan struktur dan perubahan sosial, namun memiliki tekanan yang berbeda. Dalam eksplanasi ekologis, degradasi lingkungan diasumsikan sebagai kondisi buruk ketika terjadi ketidakseimbangan antara *supply depot* (tempat yang menyediakan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia), *waste repository* (tempat pembuangan barang yang dipergunakan oleh manusia) dan *living space* (tempat makluk mempertahankan hidup dan kehidupan).

Menurut Wehr, ada enam pendekatan utama yang dilihat dari segi proposisi sentral: konflik merupakan pembawaan sejak lahir di dalam binatang sosial, konflik ditimbulkan oleh sifat masyarakat dan cara mereka dibentuk, konflik adalah disfungsi dalam sistem sosial dan sebuah gejala ketegangan patologis, konflik adalah ciri yang tidak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarki internasional, konflik adalah hasil kesalahan persepsi dan komunikasi yang buruk, dan konflik adalah proses alami yang umum bagi semua masyarakat (Miall dkk, 2002).

Dengan mengadaptasi panduan pemetaan konflik dari Wehr, Miall dkk (2002) menyarankan langkah-langkah untuk analisis konflik awal, panduan pemetaan konflik atau analisa konflik sebagai berikut:

A. Latar belakang

1. Peta area
2. Diskripsi singkat
3. Garis-garis besar sejarah konflik

B. Pihak-pihak yang bertikai dan persoalannya

1. Siapa yang jadi inti pihak yang bertikai
2. Apa persoalan konflik
Apa mungkin membedakan antara posisi, kepentingan (kepentingan materi, nilai, hubungan) dan kebutuhan
3. Apa hubungan antara pihak-pihak yang bertikai
4. Apa persepsi penyebab dan sifat konflik di antara pihak-pihak yang bertikai
5. Apa perilaku akhir-akhir ini pihak-pihak yang bertikai

6. Siapa pemimpin pihak-pihak yang bertikai. Pada tingkat elit dan individual, apa tujuan, kebijakan, kepentingan, kekuatan dan kelemahan relatif mereka.

C. Konteks: faktor-faktor global, regional dan tingkat negara

1. Pada level negara: Bagaimana keterbukaan dan aksesibilitas aparaturnya? Apakah ada institusi atau badan yang dapat berfungsi sebagai saluran legitimasi untuk mengelola konflik. Bagaimana masalah keadilan dalam pembangunan ekonomi dan apakah ada kebijakan ekonomi yang dapat mempunyai dampak positif.
2. Pada tingkat regional: bagaimana hubungan dengan negara dan masyarakat tetangga dapat mempengaruhi konflik. Apakah pihak-pihak yang bertikai mempunyai pendukung regional eksternal.
3. Pada tingkat global: apakah ada kepentingan geopolitik dari pihak luar dalam konflik itu. Apa faktor eksternal yang menjadi pendorong dan apa yang dapat mengubahnya.

Coser (1956) dalam bukunya *"The function of social conflict"*, mengatakan bahwa konflik didefinisikan sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Dikatakan juga oleh Coser bahwa intensitas konflik amat ditentukan oleh faktor-faktor, antara lain: keterlibatan emosional para partisan, ketaatan struktur sosial, tarap realisme konflik, jangkauan konflik terhadap nilai-nilai, dan tingkat objektivitas.

Sementara itu, menurut Dahrendorf (1986), analisis masyarakat dengan memakai segi pandangan konflik bertitik tolak dari kenyataan bahwa anggotanya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu orang yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Dualisme ini, yang termasuk struktur dan hakikat tiap-tiap kehidupan bersama, mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan mungkin saling berlawanan. Pada gilirannya diferensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok-kelompok yang berbenturan. Inilah ketiga pengertian kunci, yaitu kekuasaan, kepentingan dan kelompok konflik.

Menurut Druckman dalam Usman (2001) konflik sumberdaya alam dapat digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis diantara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha atau investor. Hubungan yang tidak harmonis itu diawali ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumberdaya alam. Sehingga terjadi perbedaan akses. Perbedaan akses itu membuat pemerintah dan pengusaha atau investor dapat menikmati hasil terlalu banyak, sementara itu masyarakat terabaikan. Kondisi semacam ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Konflik muncul kepermukaan ketidakpuasan itu bertemu dengan semangat juang memperbaiki nasib secara kolektif, dan konflik itu menjadi semakin keras ketika ketidakpuasan dan semangat semacam itu bertemu secara simultan dengan akumulasi perasaan dan kesadaran bahwa telah terjadi penindasan dalam masyarakat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Latar belakang pemilihan lokasi ini di latarbelakangi karena daerah ini dianggap paling banyak intensitas konflik sosial yang terjadi, merupakan wilayah konservasi TNKS paling luas (52% wilayahnya termasuk dalam kawasan konservasi TNKS), dan paling banyak penduduk yang terkena dampak dari penetapan kawasan konservasi TNKS.

3.2. Teknik Pemilihan Responden dan Pengumpulan Data

Responden kunci diambil dari orang yang terlibat dalam konflik maupun individu yang mengetahui ataupun memahami secara mendalam konflik kepentingan dibalik konservasi di kawasan TNKS. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive. Responden kunci yang diambil adalah dari pihak pemerintah pusat, dari pihak pemerintah daerah, dari pihak masyarakat lokal khususnya petani, dan NGO/LSM yang bergerak dalam bidang konservasi.

Data yang dikumpulkan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan: studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

3.3. Analisis Data

Proses analisis dimulai dengan menelaah informasi atau data yang sudah diperoleh, baik data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara ataupun melalui studi dokumentasi. Setelah dibaca, ditelaah dan dipelajari keseluruhan informasi atau data dirangkum dalam kategori-kategori sesuai dengan masalah dan tujuan studi, selanjutnya diklasifikasi dan dikontruksikan dengan pendekatan kualitatif ke dalam deskripsi utuh dan kemudian, dianalisis sampai memungkinkan diambil kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konteks, Pihak-Pihak, dan Isu-Isu Konflik

Pemetaan konflik, dalam kata-kata Wehr (1979), adalah “langkah pertama dalam campur tangan untuk mengelola sebuah konflik tertentu”. Tindakan ini memberikan pada pihak yang ikut campur tangan dan pihak-pihak yang bertikai sebuah pemahaman yang lebih jelas tentang asal-usul, sifat, dinamika dan kemungkinan penyelesaian konflik. Pemetaan konflik juga merupakan metode menghadirkan sebuah analisa terstruktur terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu pula. Metode ini digunakan para analis guna memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik, dan juga digunakan dalam workshop penyelesaian konflik untuk memberikan pada para partisipannya sebuah gambaran konflik yang sedang diamati. Setiap peta konflik tertentu harus dipahami mewakili pandangan para pengarang, dan sebagai sebuah skema, lebih bersifat indikatif ketimbang bersifat menyeluruh (Miall dkk, 2002).

Dalam memudahkan analisa pembahasan tentang konflik maka pemetaan terhadap konflik merupakan salah satu cara ataupun metode dalam usaha untuk memperoleh gambaran tentang sebab akibat lahirnya konflik, pihak yang terlibat konflik, isu yang dikonflikkan serta dinamika dari konflik itu sendiri. Untuk itu, Trijono (2002) menjelaskan metode yang terkenal dikembangkan oleh Paul Wehr dengan analisa elemen-elemen konflik yang penting, yaitu:

Pertama, konteks atau situasi yang mencakup kondisi situasi fisik, sosial objek dimana konflik berlangsung. *Kedua*, pihak berkonflik yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam konflik, yang berkepentingan baik langsung atau tidak langsung

terhadap hasil konflik. Masing-masing pihak memiliki posisi dan kepentingan atau kebutuhan terhadap konflik. *Ketiga*, isu atau masalah yang dikonflikkan, yaitu topik dan objek masalah yang dikonflikkan. Isu bisa bersifat personal-subjektif dan posisional seperti identitas, agama, etnis kekuasaan, dan sebagainya. Bisa juga bersifat kepentingan atau kebutuhan seperti ekonomi-politik dan kebutuhan pokok. *Keempat*, dinamika konflik meliputi intensitas dan keluasan konflik, hal ini bisa dilihat pada perilaku, hubungan antara pihak berkonflik, keluasan cakupan pihak yang terlibat dalam konflik dan akibat ditimbulkan konflik. *Kelima*, alternatif penanganan konflik yang bisa diajukan setelah melihat kelemahan dan kelebihan penanganan konflik, yang dilakukan selama ini dan memperbandingkan konteks, pihak, isu dan dinamika konflik.

Selama 32 tahun Rezim Orde Baru berkuasa sistem sosial politik yang dibangun sangat bersifat sentralistik dan otoriter. Hampir tidak ada peluang untuk terciptanya ruang publik bagi masyarakat untuk mengkritisi pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diposisikan sebagai objek bagi pembangunan oleh negara bukan sebagai subjek dari pembangunan. Pemerintahan Orde Baru menerapkan konsep pembangunan yang bersifat “*top down*”, dalam hal ini kebijakan yang diambil pemerintah pusat mutlak dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Segala sesuatu kebijakan ditentukan pemerintah pusat yang kadangkala keputusan yang dibuat cenderung merugikan kepentingan masyarakat. Sifat sentralistik dan otoriter yang sengaja dibangun oleh Orde Baru ini juga terjadi dalam sektor pengelolaan bidang kehutanan. Pemerintah pusat menentukan segala sesuatu yang menyangkut kebijakan sektor kehutanan, dan sering kali kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut merugikan kepentingan masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan hutan. Timbulnya ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dimana masyarakat tidak dilibatkan. Hal lain yang terjadi pada masa Orde Baru ini masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi tidak saja dirugikan secara moril dan materil namun mereka tidak jarang disinggirkan oleh pemerintah dari daerah yang telah lama mereka tempati sejak berabad-abad yang lalu.

Nugroho (2002) dalam Awang (2002) mengatakan bahwa kita memahami dari tahun ke tahun perspektif pengelolaan sumberdaya hutan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sosial politik yang terjadi. Bahkan lebih tinggi lagi paradigma pengelolaan sumberdaya hutan juga berubah secara mendasar terutama dalam

menyongsong gelombang demokrasi dunia. Pada masa Rezim Orde Baru pendekatan pengelolaan sumberdaya hutan lebih cenderung kepada Manajemen Hutan Berbasis Negara (*State Base Forest Management*). Pada era itu pengelolaan sumberdaya hutan bersifat sentralistik, berbagai kebijakan diputuskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat tinggal melaksanakan juklak-juklak yang telah disusun tanpa harus menginterpretasikan lebih lanjut. Dinas-dinas kehutanan yang terletak di tingkat lokal lebih merupakan pelaksana-pelaksana yang setia dari pada berperan sebagai pintu masuk bagi artikulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal yang seharusnya bisa digunakan sebagai landasan pijakan.

Kemudian juga dikatakan oleh Nugroho (2002) bahwa akibat dari ketiadaan keadilan di sektor kehutanan dalam pengelolaan dan pembagian hasil muncul protes-protes sosial masyarakat desa hutan. Namun karena kuatnya rezim pada waktu itu, setiap protes yang muncul bisa diredam melalui aparaturnegara, dalam hal ini militer, sehingga protes-protes yang berskala besar dapat ditiadakan. Ini tidak berarti gerakan protes sosial di sektor kehutanan menghilang pada masa Orde Baru. Protes-protes sosial muncul dengan berbagai varian, mulai dari *saminisme*, *hidden transcript* (perlawanan terselubung seperti menggunakan olok-olok atau pembangkangan) hingga banditisme hutan. Bahkan tidak jarang melakukan penebangan gelap untuk kepentingan subsistensi atau kelangsungan hidup.

Demikian pula halnya dalam konflik di kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat, juga terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Pemerintahan rezim Orde Baru berkuasa telah menetapkan daerah-daerah yang ada di beberapa provinsi di Sumatera seperti Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam penetapan kawasan konservasi ini pemerintah pusat mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan taman nasional yang telah lama mendiami daerah mereka selama ini. Konsekuensi dari ditetapkannya menjadi kawasan konservasi TNKS ini adalah masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi TNKS harus dipindahkan ke lokasi yang baru. Hal ini jelas sangat merugikan bagi masyarakat setempat. Sangat banyak sekali kerugian baik moril dan materil yang mereka derita, sedangkan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak setimpal dampak yang diderita oleh masyarakat.

4.2. Konflik antara Pemerintah dan Kepentingan Global

Untuk melakukan kontrol terhadap kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang tersebut, negara-negara industri maju melakukan dengan menggunakan perpanjangan tangan mereka melalui lembaga *funding* internasional yang ada seperti Bank Dunia dan IMF. Dengan lembaga keuangan internasional tersebut negara-negara industri maju melakukan intervensi ke negara-negara berkembang dengan berbagai kebijakannya ekonomi, politik dan sebagainya untuk menekan negara-negara berkembang termasuklah Indonesia untuk menuruti kehendak lembaga internasional tersebut. Apabila keinginan negara-negara industri maju tersebut ataupun keinginan dari lembaga keuangan internasional tersebut dipenuhi oleh negara-negara sedang berkembang maka kucuran dana untuk negara-negara berkembang akan diberikan oleh lembaga internasional tersebut. Kita tentu tahu bahwa negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia dalam menjalankan roda pembangunan sangat tergantung sekali dengan hutang.

Jadi dibalik konservasi yang ada itu tersimpan keinginan tersembunyi dari kepentingan internasional (global) untuk melakukan berbagai intervensi dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya alam di negara-negara dunia ketiga. Dimana kepentingan-kepentingan lembaga internasional tersebut seringkali berseberangan dengan keinginan negara-negara industri maju. Seringkali kepentingan negara-negara maju dan lembaga internasional tersebut merugikan bagi kepentingan negara-negara sedang berkembang. Hal inilah menjadi akar konflik kepentingan kedua belah pihak

4.3. Konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konservasi TNKS ini ada beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya konflik yang bersifat horizontal tersebut. Konflik antara pemerintah pusat dalam hal ini diwakili pihak Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) dengan pemerintah daerah ini bermula adanya keinginan-keinginan pemerintah daerah dalam konservasi TNKS yang jelas tidak bisa diterima oleh pihak Balai Taman Nasional.

Kekayaan sumberdaya alam sangat melimpah yang terdapat dalam kawasan konservasi TNKS, seperti hasil hutan yakni kayu dan rotan, kekayaan fauna juga yang sangat banyak terdapat di kawasan tersebut. Disamping itu, di dalam kawasan ini sangat banyak terdapat potensi tambang emas dan batu bara yang belum dapat dieksploitasi

dengan baik. Selain potensi yang ada seperti yang tersebut di atas, dalam pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki luas wilayah dan penanggungan yang serius jelas memiliki anggaran biaya yang sangat besar. Adanya ketersediaan anggaran yang sangat besar ini diduga mencapai 10 miliar per tahun serta banyaknya potensi yang terkandung di dalam kawasan konservasi TNKS ini menimbulkan keinginan berbagai pihak untuk dapat mengelolanya. Pihak yang sering terlibat dalam konflik kepentingan dalam pengelolaan TNKS ini adalah Pemerintah Pusat (BTNKS) dan Pemerintah Daerah, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO). Bentuk konflik antara pemerintah pusat dan daerah ini adalah konflik perebutan hak mengelola kawasan konservasi, konflik pembangunan jalan, dan konflik eksploitasi tambang.

4.4. Konflik antara Pemerintah dan Rakyat

Tidak diikutsertakannya elemen masyarakat lokal khususnya petani yang berada di sekitar kawasan konservasi dalam penentuan kawasan konservasi TNKS pada akhirnya telah menuai konflik vertikal dalam konservasi TNKS tersebut. Konflik vertikal yang dimaksud adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara. Konflik vertikal ini bersifat laten karena benih-benihnya sudah ada dan terpendam dengan baik pada masa rezim Orde Baru. Dalam konflik laten ini negara menggunakan tangan-tangan militer dan aparat negara untuk melakukan intimidasi dan tekanan pada masyarakat yang berani melakukan perlawanan dan penentangan pada negara. Siapa yang berani melakukan perlawanan dan penentangan pada negara akan diintimidasi dan bahkan bisa dilenyapkan karena dianggap dapat mengganggu proses pembangunan.

Munculnya konflik antara negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan rakyat (masyarakat lokal petani) yang berada di sekitar kawasan konservasi bermula dari kepentingan antara pemerintah dan rakyat yang memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda dan tidak menemukan titik temu penyelesaiannya. Dalam konflik antara pemerintah dan rakyat ini posisi rakyat atau masyarakat lokal dalam kondisi ter subordinasi oleh pemerintah. Masyarakat banyak dirugikan karena memang konflik yang terjadi adalah konflik vertikal dimana posisi negara lebih kuat dari rakyat dalam segala hal. Negara sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang disatu sisi, sedangkan rakyat disisi lain ditempatkan sebagai pihak yang berada dalam pengaruh kekuasaan negara yang sangat besar, sehingga rakyat berada dalam posisi yang tidak berdaya dalam menghadapi hegemoni negara.

Perlawanan lain pernah juga dilakukan masyarakat yang menolak untuk dipindahkan ke lokasi pemukiman dan lahan pertanian mereka yang baru, letaknya jauh dari lokasi konservasi. Masyarakat tidak mau pindah dan tetap bertahan ditempat tinggal mereka. Maka aparat pemerintah melakukan pemaksaan dengan cara membongkar lahan pertanian masyarakat, membongkar rumah penduduk dan bersikap kasar pada masyarakat untuk mengusir masyarakat agar segera meninggalkan pemukiman dan lahan pertanian mereka yang berada di lokasi kawasan konservasi. Terjadinya konflik fisik antara masyarakat dengan aparat tidak dapat dihindari sehingga menimbulkan kerugian dikedua belah pihak. Masyarakat berusaha untuk mengadu kepada penegak hukum namun akhirnya masyarakat tetap kalah karena dituduh telah melawan pada negara dan melakukan perusakan pada kawasan konservasi.

Berbagai bentuk perlawanan lain masyarakat terhadap negara adalah terjadi pembangkangan masyarakat yang tidak rela lahan kebun dan sawah mereka dijadikan kawasan konservasi. Ada masyarakat yang telah meninggalkan kawasan konservasi lalu kembali lagi ke tempat tinggal mereka semula di kawasan konservasi karena tempat yang baru dianggap tidak sesuai dengan kehendak mereka dan tidak cocok untuk lahan pertanian khususnya kebun dan sawah. Hal ini merupakan bentuk dinamika tarik menarik konflik kepentingan antara masyarakat dengan negara. Masyarakat hanya memiliki kepentingan untuk menjaga hak mereka selama ini atas kebun, sawah dan tempat tinggal sebagai tempat mereka hidup. Namun negara memiliki kepentingan menjaga keutuhan kawasan konservasi agar tidak terganggu keberadaannya. Bentuk konflik antara pemerintah dan rakyat dalam konservasi adalah sikap refresif dan sentralistik pemerintah, penentuan tata batas, dan tumpang tindih lahan.

4.5. Resolusi Konflik

Salah satu resolusi adalah bentuk pengelolaan kawasan konservasi bisa dilakukan secara kolektif (pemerintah pusat dan daerah) dan partisipatif dari elemen masyarakat yang ada, sehingga kawasan konservasi menjadi milik bersama. Upaya mengoptimalkan potensi yang ada dalam kawasan konservasi perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Misalnya, mengoptimalkan potensi objek wisata yang banyak terdapat dalam kawasan konservasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat lokal.

Negara perlu memikirkan dan mengakomodir kepentingan masyarakat lokal yang telah lama hidup di sekitar kawasan konservasi. Negara tidak seharusnya melakukan pemaksaan dan pengusiran masyarakat dari kawasan konservasi karena selama ini rakyat hidup selaras dengan hutan. Untuk itu, konsep hutan kemasyarakatan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Serta perlu adanya kejelasan tapal batas dan tumpang tindih lahan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal dan kawasan konservasi. Perlu adanya penerapan sistem zonasi yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Hal lain yang perlu dipikirkan menerapkan konsep *community based management* dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga dapat memberikan pemberdayaan pada masyarakat dalam mengelola hutan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah:

1. Konflik kepentingan pertama yang terjadi pada kawasan konservasi adalah konflik antara kepentingan pemerintah Indonesia khususnya dan negara-negara dunia ketiga dengan pihak kekuatan ekonomi politik global yang dimainkan oleh negara-negara industri maju melalui lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, yang melakukan intervensi dan tekanan pada negara-negara dunia ketiga dalam kebijakan konservasi. Latar belakang konflik antara adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak yang sulit untuk menemukan titik temu. Ada keraguan bahwa isu konservasi yang dibawa oleh negara-negara industri maju adalah upaya untuk menjaga agar bisnis negara-negara industri maju tetap berjalan karena membutuhkan pasokan bahan mentah dari negara-negara dunia ketiga.
2. Konflik yang kedua dibalik konservasi ini adalah konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana saat ini era otonomi daerah muncul gejolak dari daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam untuk mengelola kekayaan daerahnya sendiri yang selama ini dikelola pemerintah pusat. Kemudian akar konflik antara pemerintah daerah ini adalah adanya keinginan daerah untuk membangun jalan baru untuk membuka isolasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan konservasi. Serta terakhir keinginan pemerintah daerah

adalah untuk mengeksploitasi kekayaan tambang yang ada di daerah, yang letaknya berada di kawasan konservasi.

3. Konflik yang ketiga adalah konflik kepentingan antara negara dan rakyat. Dalam hal ini yang menjadi akar masalah munculnya konflik adalah adanya penetapan kawasan konservasi yang tidak melibatkan masyarakat lokal yang ada di kawasan konservasi oleh negara.

5.2 Saran

1. Dalam konflik global antara negara-negara industri maju dan lembaga-lembaga internasional dengan negara-negara dunia ketiga dalam konservasi, perlu adanya keterpaduan dari masing-masing pihak dalam menjalankan konservasi yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada bukan saling memaksakan kehendak. Harus adanya pemberdayaan dan kemandirian secara ekonomi dan politik bagi negara-negara dunia ketiga khususnya Indonesia dalam menjalankan kebijakan konservasinya
2. Dalam konflik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dicari solusi yang dapat menampung kepentingan masing-masing pihak yang ada tanpa harus mengorbankan kepentingan konservasi. Dalam artian bentuk pengelolaan kawasan konservasi bisa dilakukan secara kolektif (pemerintah pusat dan daerah) dan partisipatif dari elemen masyarakat yang ada sehingga kawasan konservasi menjadi miliki bersama. Perlu mengoptimalkan potensi yang ada dalam kawasan konservasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Misalnya, mengoptimalkan potensi objek wisata yang banyak terdapat dalam kawasan konservasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat lokal.
3. Dalam konflik antara negara dan rakyat, perlu kiranya negara untuk memikirkan dan mengakomodir kepentingan kehidupan masyarakat lokal yang telah lama hidup di sekitar kawasan konservasi. Untuk itu, perlu konsep hutan kemasyarakatan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Perlu adanya kejelasan tapal batas dan penyelesaian tumpang tindih lahan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal dan kawasan konservasi. Penerapan sistem zonasi yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Hal lain yang perlu dipikirkan menerapkan konsep *community based management* dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga dapat memberikan pemberdayaan pada masyarakat dalam mengelola hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1995. *Laporan Survei TNKS Propinsi Jambi*. Bappeda TK I Jambi, Jambi.
- Anonim. 2002. *Kerangka Kerja Pengelolaan TNKS 2002-2006*. Tidak diterbitkan. BTNKS, Jambi.
- Awang, San Afri. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. CCSS dan Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Coser, Lewis. 1956. *The Fuction of Social Conflict*. Free Press, New York.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Rajawali, Jakarta.
- Hannigan, John A. 1995. *Enviromental Sociology, A Social Contructionist Perspective*. Routledge, London and New York.
- Keraf, A Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Kompas, Jakarta.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Rajawali Press, Jakarta.
- Mitchell, Bruce, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kulitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Muslimin. 2003. *Peran Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan TNKS*. Makalah Seminar Nasional “Peran Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Masyarakat Adat Menyelamatkan TNKS”. Sungai Penuh-Jambi, 5 Juli 2003.
- Scott, James C. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. LP3S, Jakarta.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suhartini, Arikunto.1993. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Trijono, Lambang. 2002. *Pemetaan dan Penjelasan Konflik*. Makalah Disajikan pada Workshop Konsolidasi Jaringan dan Pemetaan Potensi Konflik di Yogyakarta-Jateng, Lembaga Lintas Sara Yogyakarta. Yogyakarta.

Usman, Sunyoto. 2001. *Konflik dan Resolusi Konflik Sumberdaya Alam Perspektif Sosiologis*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.